

**PERSEPSI MASYARKAT TERHADAP DAERAH PERLINDUNGAN LAUT (DPL)  
DI DESA KOROE ONOWA KECAMATAN WANGI-WANGI  
KABUPATEN WAKATOBI**

**La Sarifudin**

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari  
Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Email Corresponding author : sarifudin@yahoo.com

**Mardin**

Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari  
Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Email : mardin@gmail.com

**Suriana**

Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari  
Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Email : suriana.sp@uho.ac.id

**To cite this article:**

Sarifudin, L., Mardin., Suriana. 2019. Persepsi Masyarakat terhadap Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Bpsosek. 21(1), 24-29. <http://dx.doi.org/10.33772/bpsosek.v37i1.6391>

**Received:** February, 29, 2019; **Accepted:** April 22, 2019; **Published:** April 30, 2019

**ABSTRACT**

This research was conducted in Koroe Onowa Village, Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. The key informants in this study were capture fishermen, based on fishing gear used such as (fishing rods, nets, arrows, and shellfish collectors), Village Heads and Marine Protected Areas Management Groups who live in Koroe Onowa Village, Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. While the key informant in this study were fishermen on Onowa Koroe Village. The data analysis model in the study is qualitative data analysis carried out interactively and takes place continuously at the research stage so that it is complete. Based on the results of the study it can be concluded that the perception of fishermen does not question the appropriateness of Marine Protected Areas both from the establishment, management, purpose, benefits and rules of Marine Protected Areas, perceived as conservation areas by fishermen in Koroe Onowa Village even fishermen supporting the Marine Protected Area program as a buffer and preservation of the sea and all biota contained in it besides the DPL program opens opportunities for micro and medium enterprises, especially the development of local economies, but management of Marine Protected Areas in Koroe Onowa Village is still not optimal because it allows fishing in the Marine Protected Area as a prohibited area to take it permanently so it is recommended that the implementation of the Marine Protection Area be carried out consistently for marine conservation.

**Keywords:** *Perception; Fisherman; Marine Protected Areas.*

**PENDAHULUAN**

Program DPL merupakan salah satu alternatif konservasi suatu kawasan laut ditingkat desa yang diyakini akan memiliki dampak penting jangka menengah dan panjang dalam upaya melestarikan sumberdaya alam laut dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia. Salah satu pendekatan pengelolaan laut berbasis masyarakat di wilayah Indonesia adalah program DPL yang difasilitasi oleh proyek COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation*

*and Management Program*) dan di danai oleh Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI). Tujuan Program DPL yaitu untuk pengembangan Kawasan Konservasi Laut di tingkat desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. DPL dikelola oleh masyarakat di tiap-tiap desa, program ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya jejaring kawasan konservasi laut di wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Salah satu kabupaten yang merupakan sasaran program DPL adalah Kabupaten Wakatobi (COREMAP II ADB. 2006)

Wakatobi yang memiliki potensi kelautan dan perikanan serta potensi wisata bahari yang menjadi daerah tujuan wisatawan nusantara dan mancanegara. Potensi tersebut harus dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. peluang, tetapi juga Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan menjadi tantangan dan persoalan bagi sumber daya alam daerah apabila tidak dikelola secara arif dan bijaksana. Terutama pada sumber daya laut yang merupakan sasaran utama masyarakat nelayan. Sebab sebagian besar masyarakat Wakatobi berprofesi sebagai nelayan, hal ini didukung oleh potensi sumber daya laut yang melimpah (Anonim, 2012)

Melimpahnya sumber daya laut adalah salah satu alasan masyarakat Wakatobi berprofesi sebagai nelayan (BPS. 2016). Menurut Bengen (2002), agar ekosistem dan sumber daya dapat berperan secara optimal dan berkelanjutan maka diperlukan upaya-upaya perlindungan dari berbagai ancaman degradasi yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas langsung. Upaya ini Konservasi Sumber pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak dijelaskan dalam UU. Nomor 5 Tahun 1990 tentang daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 8 yaitu Pemerintah menetapkan 1) wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, 2) pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, 3) pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan (UU Lingkungan hidup 2010).

Penetapan DPL akan bertentangan dengan masyarakat yang pekerjaan utamanya adalah nelayan di sekitaran Desa Koroe Onowa, hal ini diduga karena semakin kurangnya lahan penangkapan yang strategis, dekat, dan mudah dijangkau oleh nelayan. Sementara masyarakat yang tinggal di Desa Koroe Onowa mayoritas nelayan tangkap, apalagi kebanyakan dari nelayan tersebut memiliki pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap suatu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah walaupun kebijakan tersebut bermanfaat bagi mereka dan lingkungannya, tetapi terkadang masyarakat tidak mengetahui apa maksud dari kebijakan pemerintah. Penetapan DPL banyak masyarakat nelayan yang berpersepsi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya pendidikan, umur, dan wawasan pengetahuan tentang suatu kebijakan. Banyaknya jumlah penduduk akan memberikan persepsi yang berbeda-beda pula (Pomeroy *et al*, 2004).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Informan atau responden adalah orang yang akan diwawancarai sebagai sumber data, sementara informan kunci adalah orang yang diperoleh dari informan dimana informen kunci merupakan orang yang mampu memberikan informasi secara mendalam yang ditentukan oleh peneliti dan akan menjadi patokan atau fokus penelitian dalam memperoleh data. Data-data yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa data tentang DPL, dan persepsi nelayan terhadap objek penelitian maupun aktifitasnya sebagai nelayan. Selain itu informan kunci merupakan orang yang akan diamati oleh peneliti selama melakukan penelitian.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah nelayan tangkap, berdasarkan alat tangkap yang digunakan seperti: (pancing, jaring, panah dan nelayan pengumpul kerang), Kepala desa dan Pokmaswas (kelompok pengelola DPL) yang tinggal di Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi. Sementara informan kunci dalam penelitian ini adalah nelayan Desa Koroe Onowa. Model analisis data dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada tahapan penelitian sehingga sampai tuntas (Sugiyono. 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Nelayan Terhadap Keberadaan DPL di Desa Koroe Onowa

DPL merupakan suatu kawasan yang dilindungi dan dikenal sebagai daerah larang ambil (Tulungen, 2003). Pemanfaatan sumber daya alam berbasis DPL bukan pemanfaatan sumber daya laut secara langsung (menangkap ikan dan hasil laut lainnya seperti: kerang-kerang, teripang dan jenis biota laut yang memiliki ekonomi tinggi lainnya yang ada di daerah tersebut) melainkan pemanfaatan sumber daya alam seperti: (budidaya perikanan, karang, wisata. yang sifatnya memelihara sumber daya laut yang arif dan bijaksana. Program DPL mengajarkan masyarakat untuk bagaimana mengelola sumber daya laut secara arif dan bijaksana. sehingga kualitas Taman Nasional stabil ataupun meningkat. Meningkatkan kualitas sumberdaya alam di Taman Nasional Wakatobi akan menjadi salah satu daya tarik wisata dan perhatian dunia khususnya Indonesia. Wakatobi sebagai Taman Nasional yang diresmikan pada tahun 2002 silam yang lalu dan dijuluki sebagai segi tiga karang dunia, yang memiliki 900 spesies ikan dan 750 dari 850 jenis karang yang ada didunia.

Keberadaan DPL merupakan hal yang baru bagi nelayan. Hal tersebut berbagai persepsi dan penilaian tentang keberadaan program tersebut diperbincangkan dikalangan masyarakat nelayan. Oleh karena itu maka perlu diketahui, apakah keberadaan DPL diterima oleh nelayan atau tidak, dan apakah keberadaan DPL berdampak positif atau negatif bagi nelayan. hal tersebut perlu diketahui, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menyajikan persepsi nelayan terhadap keberadaan DPL, persepsi tersebut disajikan dalam bentuk "DPL *iso no leama pantaeda noguru kita ako ane to jaga te mawinto* (DPL itu bagus karena keberadaan DPL memberikan dampak yang baik terhadap pemeliharaan laut)" (Uma, Wawancara tanggal 10-03-2018).

Berdasarkan pernyataan diatas keberadaan DPL memberikan manfaat pada perlidungan laut, artinya keberadaan DPL memberikan kesempatan dan kesadaran kepada masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan keaslian kondisi laut yang ada disekitarnya, menjaga dan melindungi laut bukan berarti laut tidak bisa dimanfaatkan, pemanfaatan laut bukan semata- mata harus menangkap biota laut akan tetapi kondisi laut yang memiliki potensi wisata bisa sehingga beberapa difungsikan sebagai pengembangan tempat wisata manfaat dan peluang usaha bisa muncul seperti pengembangan ekonomi lokal bagi para pengrajin kuliner, kelembagaan pengelola pantai, penambahan infrastruktur yang dapat memberikan daya tarik sekaligus pembelajaran bagi siapa saja yang datang berwisata di lokasi tersebut.

### Persepsi Nelayan Terhadap Tujuan DPL di Desa Koroe Onowa

Tujuan DPL merupakan bentuk dari wujud konservasi laut, bahwa DPL memberikan beberapa manfaat yaitu DPL diperuntukan sebagai penunjang budidaya perikanan, menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati terumbu karang, ikan, dan biota lainnya dan dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengguna, memperkuat masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan mendidik masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan. Namun terkadang sebagian masyarakat tidak mengetahui hal tersebut sehingga sering terjadi pertentangan dimasyarakat intah itu pemerintah dan masyarakat ataupun masyarakat sesama masyarakat terkait dengan tujuan suatu program DPL, hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat dan pengetahuan tentang DPL. Dipresepsikan oleh salah satu nelayan, presepsi tersebut disajikan dalam bentuk pernyataan berikut:

*"Tujuan nu DPL iso to jaga te nei nu mawi ako ane mbeaka no jao na watu rumbu, ika kene nei nu mawi heleno* (Menjaga dan Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Terumbu Karang, Ikan dan Biota Laut Lainnya" (Uma, Wawancara tanggal 10-03-2018).

Pernyataan di atas merupakan bentuk persepsi nelayan terhadap tujuan DPL, nelayan tersebut mempersepsikan DPL sebagai kawasan pelestarian kawasan laut yang menunjang budidaya terumbu karang, ikan dan bentuk pelestarian kawasan laut lainnya seperti perlidungan penyu, ikan langka, kerang, kualitas air laut "Tujuan DPL sebagai pengembangan tempat tujuan wisata dan mendidik masyarakat dalam konserwasi dan pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan" (Samudu, Wawancara tanggal 18-03-2018).

Persepsi nelayan terhadap tujuan DPL dari persepsi diatas menunjukan bawa nelayan mempersepsikan DPL sebagai pengembangan wisata. Artinya kawasan DPL diperuntukan sebagai

tempat wisata selain itu DPL juga bertujuan dalam pengelolaan untuk pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan dan DPL juga sering dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Koroe Onowa sebagai bentuk pendidikan non formal bagi nelayan. Pemberdayaan tersebut dilakukan agar nelayan memahami tujuan DPL secara baik. Persepsi nelayan terhadap tujuan DPL memberikan peluang dan kesempatan kepada Pokmaswas dan pemerintah desa agar memantau kembali penetapan DPL di Desa Koroe Onowa, sekaligus memberikan kesempatan untuk membuat aturan secara tertulis dalam mengelola DPL. Pengelolaan DPL yang baik akan menjadi salah satu contoh untuk membangun dan menarik perhatian pemerintah terhadap masyarakat desa koroe onowa, mengingat salah satu inisiatif pemerintah dalam membangun suatu kawasan adalah inisiatif masyarakat dalam membangun daerahnya.

### **Persepsi Nelayan terhadap Ukuran Lokasi DPL di Desa Koroe Onowa**

Penentuan lokasi DPL tidak ditentukan begitu saja, Akan tetapi ada beberapa kriteria, seperti di wilayah calon DPL terdapat beberapa ekosistem laut seperti karang, jenis ikan yang dilindungi, penyu. Ukuran DPL berdasarkan panduan Coremap II, Wakatobi yaitu 100 meter kali 100 meter (1 ha), sementara menurut informasi dari anggota pengelola DPL Desa Koroe Onowa ukuran lokasi DPL kurang lebih adalah 50 meter kali 750 meter atau kurang lebih 3,25 Ha. Lokasi ini memanjang mengikuti pola *ou* (Laguna) yang menjadi indikator dari wilayah *ou* (Laguna) merupakan wilayah pemijahan ikan kerapu selain itu wilayah tersebut masih banyak terdapat jenis ikan yang berasosiasi di wilayah tersebut. Persepsi nelayan terhadap ukuran lokasi DPL sebagai berikut:

*“Ukuru nu DPL Desa Koroe Onowa mbeaka no leama na posisino pantaeda no harai melangka, no halangie na polaloa nu mia meawi. (tidak bagus posisinya karena posisinya memanjang sehingga menghalangi aktifitas nelayan)”* (Kasmudin, Wawancara tanggal 6-03-2018).

Presepsi nelayan diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi nelayan terhadap ukuran lokasi DPL tidak bagus karena wilayah DPL mengikuti pola *ou* (laguna), sementara posisi *ou* (laguna) memanjang dan menutupi pantai Desa Koroe Onowa sehingga wilayah pantai tempat berlabuhnya perahu dan sampan nelayan terhalang, hal tersebut jika DPL dikelola berdasarkan arahan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) secara otomatis perahu dan sampan nelayan akan terhalangi, karena diwilayah DPL tidak diperbolehkan sebagai tempat perahu dan sampan nelayan berlabuh. Hal yang sama juga dipersepsikan oleh salah satu nelayan yaitu: “DPL Ukuran DPL kurang tepat, karena hanya mengikuti pola *ou* (laguna) saja, seharusnya segi empat (4) karena melihat posisi laguna yang terbentang sepanjang perairan desa.”(Samudu, Wawancara tanggal 18-03-2018).

Pernyataan dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak merespon positif tentang posisi dan penetapan ukuran dan lokasi DPL, dimana penentuan lokasi DPL seperti di Desa Koroe Onowa akan memberikan suatu masalah jika DPL dikelola sesuai dengan konsep DPL dimana pada posisi Laguna yang mengikuti bentangan wilayah perairan desa, hal ini jika DPL dikelola sesuai aturan DKP maka pertentangan masyarakat pengelola dan nelayan akan sering terjadi, karena DPL merupakan kawasan lindung yang tidak diperbolehkan untuk berlabuhnya perahu dan sampan nelayan selain itu di wilayah DPL tidak diperbolehkan menangkap ikan.

Penjelasan diatas maka perlu adanya pemantauan kembali tentang lokasi DPL di Desa Koroe Onowa agar bisa dikelola sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh DKP, kemudian pada tempat berlabuhnya perahu dan sampan nelayan perlu ditetapkan sehingga wilayah DPL bisa diketahui dengan jelas. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Salm E, (2002) untuk membua kriteria dalam penentuan kawasan konservasi, namun kita harus mempertimbangkan juga faktor-faktor social ekonomi, seperti kepentingan publik, peluang ekonomi dan politik. Faktor sosial-ekonomi dan budaya pada masa lalu masih belum merupakan kriteria dalam penentuan DPL ataupun jaringan.

### **Persepsi Nelayan Terhadap Pengelolaan DPL di Desa Koroe Onowa**

DPL dikelola oleh kelompok masyarakat pengelola DPL, atau nama lain. Kelompok masyarakat atau Pokmaswas adalah kelompok kecil yang dibentuk di tingkat desa. Proses pembentukan kelompok masyarakat difasilitasi oleh fasilitator lapangan. Dalam satu desa dapat dibentuk beberapa kelompok masyarakat menurut kesamaan minat. Penguatan Pokmaswas adalah suatu proses meningkatkan kemampuan dan peran suatu kelompok masyarakat ke arah bidang kegiatan tertentu (konservasi kawasan, pembuatan fasilitas wisata, dan pengembangan usaha ekonomi lokal). Namun yang sering terjadi di Indonesia adalah pertentangan antara pengelola sumberdaya alam dengan masyarakat sering terjadi, untuk mengetahui bagaimana persepsi nelayan terhadap pengelola DPL di Desa Koroe Onowa dapat dilihat pada persepsi nelayan, persepsi tersebut dapat dijadikan sebagai berikut: "Pengelolaan DPL kurang bagus, karena kelompok pengelolah kurang perhatikan aktifitas nelayan" (Kasmudin, wawancara tanggal 6-03-2018).

Pernyataan diatas menunjukkan bentuk persepsi nelayan terhadap pengelolaan DPL, dari persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa kedua informan mempersepsikan pengelolaan DPL kurang baik karena pokmaswas kurang memperhatikan aktifitas nelayan di wilayah DPL selain kurang memperhatikan aktifitas nelayan juga mempersepsikan pengelolaan DPL dikaitkan dengan kondisi sarana dan prasarana yaitu kondisi fasilitas atau sekretariat atau dikenal sebagai pondok informasi sebagai pusat informasi DPL di Desa Koroe Onowa berdasarkan pernyataan diatas juga kurang baik. "Pengelolaan DPL di Desa Koroe Onowa kurang bagus, karena pengelola tidak memiliki tempat/sekretariat yang tidak memberikan fasilitas kepada nelayan tetap dan sebagai tempat/dermaga sebagai tempat berlabuhnya perahu dan sampan- sampan nelayan, sehingga perahu/sampan nelayan berlabuh tidak beraturan di sepanjang pantai Koroe Onowa." (Asmudin, wawancara tanggal 21-03-2018).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan DPL di Desa Koroe Onowa, berdasarkan persepsi nelayan terhadap pengelolaan DPL sudah baik dengan asumsi dasar bahwa pengelola melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan nelayan tangkap serta pemanfaatan wilayah pesisir dan perhidupan karang dan biota laut, dalam bentuk pelestarian sumberdaya laut. Sedangkan pada pernyataan informan kedua menilai pengelolaan DPL tidak bagus hal tersebut dikarenakan fasilitas yang dimiliki kelompok pengelola sebagai sumber informasi tentang DPL selain itu tim pengelolah tidak menentukan lokasi berlabuhnya kapal atau perahu nelayan sehingga kapal atau perahu nelayan tidak berlabuh secara teratur di sekitaran pantai tersebut.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada persepsi masyarakat nelayan terhadap pengelolaan DPL kurang baik hal tersebut bukan semata-mata dari pernyataan informan tetapi penulis juga menilai bahwa pengelolaan DPL di Desa Koroe Onowa jauh dari pengelolaan DPL yang sesuai dengan panduan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi fasilitas kelompok masyarakat pengelola (Pokmaswas) seperti sekretariat yg tidak menetap, peralatan penyelaman tidak ada, papan informasi tidak dipasang di sekitaran pantai melainkan dirumah salah satu anggota Pokmaswas, dan perahu dan kapal-kapal nelayan berlabuh disepanjang pantai Koroe Onowa.

### **Persepsi Nelayan terhadap Aturan DPL di Desa Koroe Onowa**

Pengelolaan DPL tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa ditunjang dengan disepakati bersama dibuatnya dan ditegakkannya aturan hukum yang antar komponen masyarakat. Aturan hukum tentang DPL paling tidak berupa keputusan desa, dan akan lebih kuat lagi apabila berupa Peraturan Desa (Perdes). Aturan hukum tentang DPL hendaknya mengandung materi muatan yang komprehensif atau menyeluruh termasuk hal-hal seperti: lokasi DPL, zona-zona di DPL, ukuran atau luasan DPL, hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam DPL, tugas dan tanggung- jawab pengelolaan, dan sanksi. Penulisan konsep Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) hendaknya dimulai dengan penulisan secara garis besar, kemudian dilanjutkan dengan penulisan secara lebih rinci.

Tim penulis dapat memulainya dengan menyempurnakannya membuat satu kerangka tulisan, dan secara bertahap menjadi rancangan aturan yang lebih rinci, hingga mengalihkannya ke dalam format dan bahasa hukum. Aspek penting perlu diperhatikan dalam proses pembuatan peraturan desa, yaitu aspek partisipasi masyarakat dan aspek aturan adat yang biasanya tidak tertulis. Agar Peraturan Desa mencerminkan kesepakatan bersama antar pihak-pihak terkait dengan demikian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka partisipasi masyarakat menjadi suatu keharusan.

Partisipasi Masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk musyawarah-musyawarah tingkat kelompok/kampung, maupun tingkat desa. Namun untuk mengetahui bagaimana persepsi nelayan terhadap aturan DPL harus melihat bagaimana terhadap DPL: persepsi nelayan berikut kutipan presepsi nelayan "Aturan DPL Desa Koroe Onowa hanya berupa sebuah aturan umum yg disepakati bersama atas larangan penggunaan alat tangkap kurang ramah lingkungan seperti: bom, potasium, akar tuba" (Samudu, Wawancara tanggal 18-03-2018). Aturan tersebut berupa larangan-larangan seperti larangan membom ikan, menggunakan akar tuba, potasium dan racun lain yang dapat menyebabkan terjadiya pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Sedangkan aturan berdasarkan panduan dari DKP belum direalisasikan oleh masyarakat secara umum untuk mengantar masyarakat dalam pembagian wilayah zonasi, Untuk mengantar masyarakat nelayan merealisasikan pelaksanaan DPL sesuai dengan aturan DKP maka perlu pemberdayaan agar masyarakat betul-betul paham tentang DPL

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa presepsi nelayan tidak memperlakukan penepatan DPL baik dari penetapan DPL, pengelolaan DPL, tujuan DPL, manfaat DPL, dan aturan DPL, dipersepsikan sebagai kawasan konservasi oleh nelayan di Desa Koroe Onowa bahkan nelayan mendukung program DPL sebagai penyangga dan pelestarian laut dan seluruh biota yang terdapat didalamnya selain itu program DPL membuka peluang usaha mikro hingga menengah khususnya pengembangan ekonomi lokal, namun pengelolaan DPL di Desa Koroe Onowa masih kurang maksimal karena memperbolehkan penangkapan ikan di wilayah DPL yang semestinya kawasan DPL sebagai daerah larang ambil secara permanen sehingga disarankan agar penerapan DPL dapat dilakukan secara konsisten bagi pelestarian laut.

### **REFERENSI**

- Anonim. (2012). Artikel Berjudul "Potensi Sumber Daya Perairan Indonesia". <http://jluph.olephel.blogspot.com/2012/03/kekayaan-laut-Indonesia.html>. (Diakses Pukul 19.02 Tanggal 25 Desember 2017.)
- Badan Pusat Statistik. (2016). Kabupaten Wakatobi dalam Angka.Wanci.
- COREMAP II ADB. 2006. Manual Tata Kelembagaan COREMAP II ADB(Governance Manual). Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Pomeroy et al. (2004). Pengelolaan dan konsep DPL.Mentri Kelautan dan Perikanan.Jakarta.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Filsafat.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tulungen E. (2003). Pengertian dan Konsep DPL. Mentri Kelautan. Jakarta.
- Bengen DG. (2002). Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Program. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian. Bogor